

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN°

4.1. Deskripsi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Sulawesi. Ibukotanya terletak di Kota Makassar, yang dulu disebut Ujung Pandang. Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam suku, antara lain Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar yang menyebar di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, juga kaya dan beragam penggunaan bahasa daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ} 12'$ sampai dengan 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ sampai dengan $122^{\circ}36'$ Bujur Timur, di sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Sulawesi Barat, Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.1
Kondisi Geografis dan Iklim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Uraian	Satuan	2014
Luas Wilayah	Km ²	46.717,48
Jumlah Kabupaten	Kab.	21
Jumlah Kota	Kota	3
Jumlah Kecamatan	Kec.	306
Jumlah Kelurahan	Kel.	785
Jumlah desa	Desa	2.253
Kecepatan Angin	knots	4
Kelembaban Udara	°C	65-90
Tekanan Udara	mb	1011,2-1012,3
Suhu Udara	°C	22,7-32,9
Curah Hujan	mm ³	2739-2977
Penyinaran	%	68-72

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2015

4.1.2. Logo Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Lambang Daerah terdiri dari 7 (tujuh) bagian dengan rincian Sebagai Berikut :

- 1). **Bintang Bersudut dan Bersinar Lima** memiliki arti Nur Cahaya mewujudkan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2). **Buah Padi dan Buah Kapas Melingkar.** Buah Padi berjumlah 17, buah kapas berjumlah 8, daun kelopak kapas bergerigi 4 dan buah bergerigi 5, menggambarkan hari Proklamasi 17-8-1945 dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3). **Sebilah badik Terhunuh** berpamor satu yang berlekuk lima mewujudkan lambang kepahlawanan serta kesiap-siagaan dalam membela kehormatan bangsa dan Tanah air yang berdasarkan Pancasila : lima lekuk pamor disesuaikan bilangan-bilangan kramat pada Pancasila.

- 4). **Gunung, Desa dan Petak-petak Sawah** melambangkan pangkal kesuburan menuju masyarakat adil dan makmur
- 5). **Semboyang dalam tulisan lontara** *To'do'puli* memiliki makna Teguh dalam keyakinan.
- 6). **Selemba Pita** bertuliskan “**SULAWESI SELATAN**”, HURUF Lontara dengan pita bercorak sarung sutra melambangkan Kebudayaan yang khas dan tingginya nilai sejak dulu kala.
7. **benteng Somba Opu** dilihat dari atas mejudkan simbol kepahlawanan Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan sangat menentang Imprealisme, Kolonialisme, Neokolonialisme dan feodalisme antara lain :
 - a). Perahu Pinisi berlayar tiga gelombang melambangkan jiwa pelaut yang ulet, penuh melintasi dan sanggup melaksanakan tujuan perjuangan proklamasi 17 Agustus 1945. Haluan Perahu mengarah ke Barat, menyiratkan letak geografis Ibukota Negara republik Indonesia.
 - b). Pacul melambangkan mayarakat agraris dan Gerigi mesin melambnagkan industri sebagai tulang punggung.
 - c). Buah Kelapa melambangkan kekayaan alam sulawesi.

Lambang Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 yang menggambarkan tentang sejarah, budaya, patriotik, sosiologis, ekonomi dan menunjukkan Daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bappeda.sulselprov.go.id)

Secara jelas lambang Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2
Logo Provinsi Sulawesi Selatan



4.1.3. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan

Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu :

“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk memberikan kejelasan makna yang terkandung didalamnya antara lain sebagai berikut :

- 1). Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- 2). Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
- 3). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- 4). Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
- 5). Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
- 6). Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
- 7). Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

4.1.4. Kondisi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Setiap Tahunnya penduduk di bumi selalu bertambah dan mengalami pertumbuhan, begitupun dengan penduduk yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan penduduk. Dari hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2014 penduduk tanah Anjing

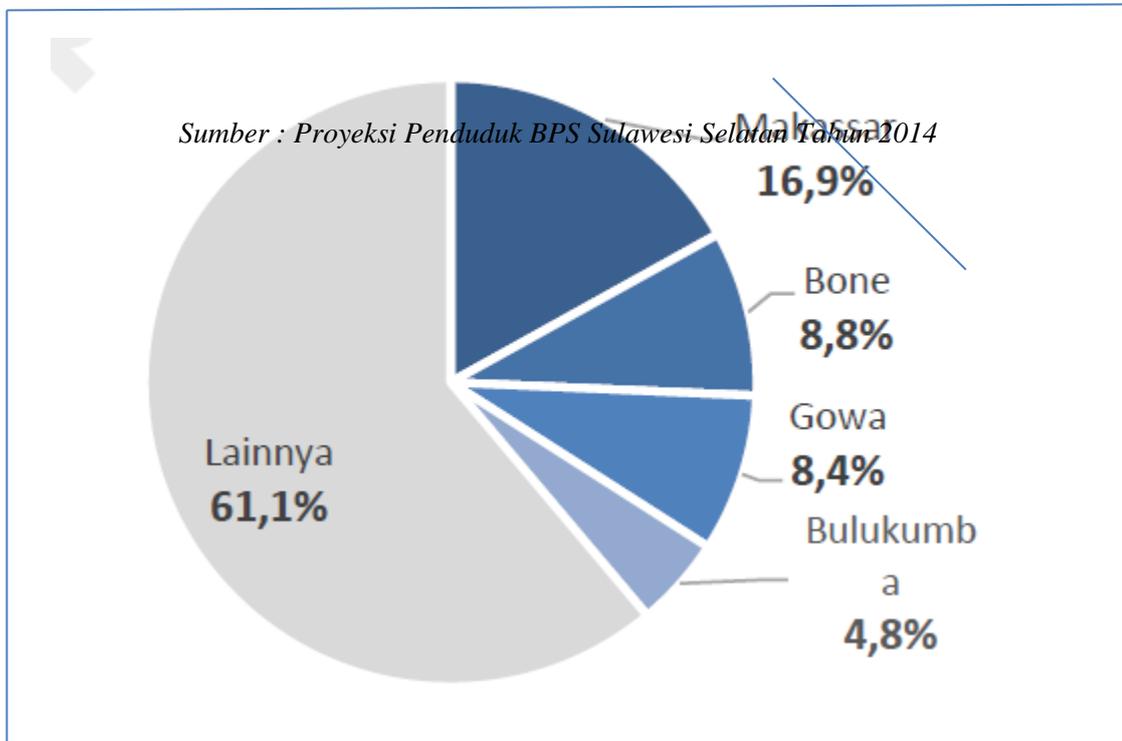
mamiri mencapai 8,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 183 jiwa/km². Distribusi penduduk di Sulawesi Selatan masih memusat pada daerah perkotaan. Dan kota Makassar menjadi kota tujuan untuk tempat tinggal, pekerjaan dan lainnya. Kota Makassar menyumbang 17%, dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk jenis kelamin laki-laki di Sulawesi Selatan, dan lebih jelas terlihat pada tabel dan Grafik diagram berikut ini

Tabel 4.2
Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kelamin dari Tahun 2012 -2014

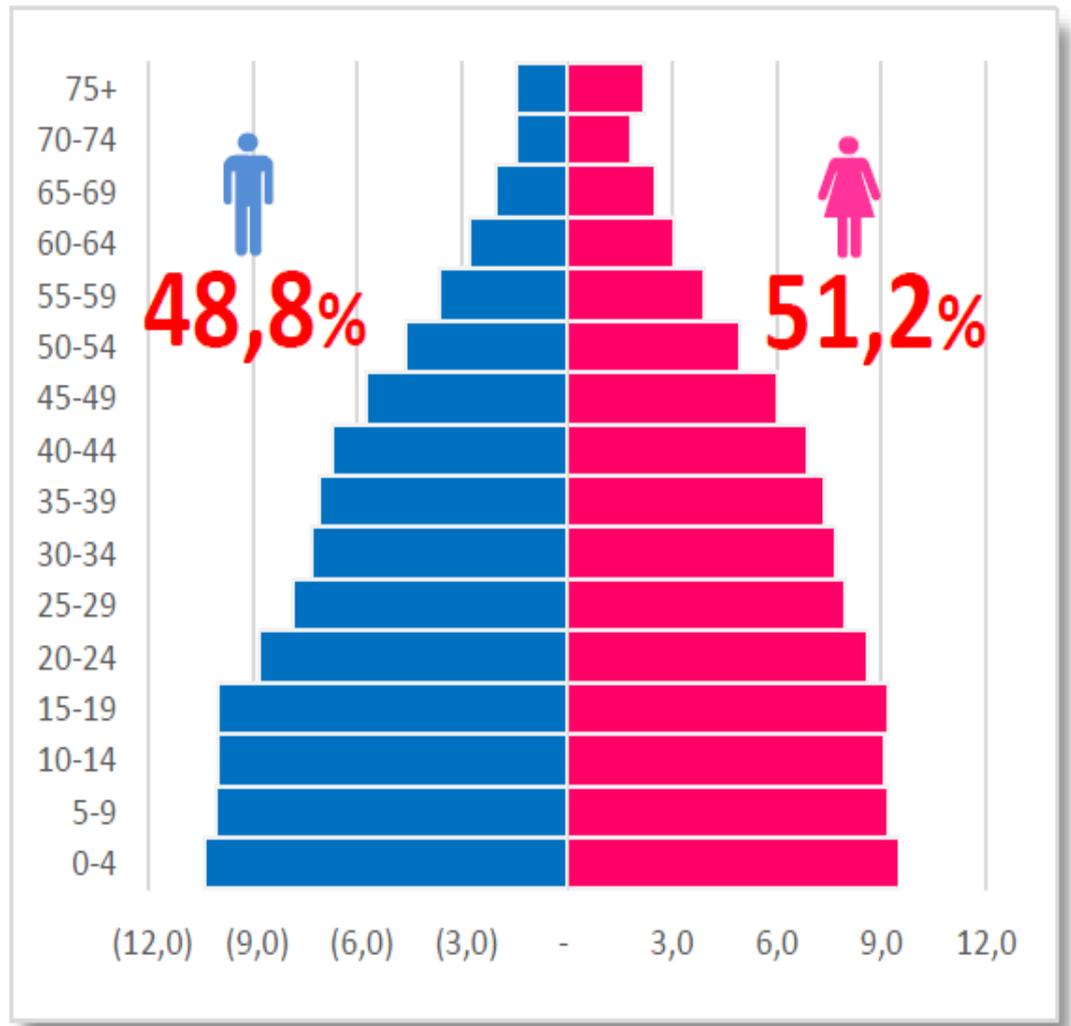
Rincian	2012	2013	2014
Jumah penduduk (Ribu jiwa)	8.250	8.342	8.432
Laki-laki	4.025	4.071	4.117
Perempuan	4.225	4.271	4.315
Sex Rasio (%)	95,27	95,34	95,40
Pertumbuhan penduduk (jiwa/km ²)	179	181	183

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Sulawesi Selatan Tahun2014

Grafik 4.1
Distribusi Penduduk Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014



Gambar 4.4
Piramida Penduduk Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Sulawesi Selatan tahun 2014

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya cukup positif yang diukur dari beberapa komponen. Kota Makassar masih yang tertinggi dengan skor 79,35 di susul Kota Parepare 75,66 dan Kota Palopo 75,65 dan yang terendah masih Kabupaten Jeneponto hanya mendapat skor 61,45 dan untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Gambar Tabel 4.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Komponen Kabupaten/Kota Tahun 2014

No	Kabupaten/kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran	IPM
1	Selayar	67,50	11,98	7,10	7.656	63,66
2	Bulukumba	66,43	12,31	6,66	9.618	65,24
3	Bantaeng	69,68	11,48	6,16	10.294	65,77
4	Jeneponto	65,39	11,68	5,63	8.417	61,45
5	Takalar	65,90	11,31	6,57	9.351	63,53
6	Gowa	69,78	12,45	6,99	8.515	66,12
7	Sinjai	66,36	11,96	7,03	8.272	63,83
8	Maros	68,50	12,37	7,17	9.355	66,65
9	Pangkep	65,37	12,37	7,31	10.161	66,16
10	Barru	67,73	13,45	7,28	9.733	67,94
11	Bone	65,81	12,16	6,11	7.845	62,09
12	Soppeng	68,42	11,45	7,04	8.699	64,74
13	Wajo	65,93	13,05	6,36	10.778	66,49
14	Sidrap	68,07	12,80	7,30	10.434	68,14
15	Pinrang	68,03	13,16	7,45	10.680	68,92
16	Enrekang	70,21	13,29	7,98	9.347	69,37
17	Luwu	69,14	12,87	7,60	8.764	67,34
18	Tana Toraja	72,11	12,89	7,81	6.214	65,08
19	Luwu Utara	67,00	12,09	7,19	10.605	66,90
20	Luwu Timur	69,44	11,95	7,80	11.859	69,75
21	Toraja Utara	72,50	12,61	7,70	6.995	66,15
22	Makassar	71,38	14,75	10,64	15.079	79,35
23	Parepare	70,39	14,04	9,96	11.692	75,66
24	Palopo	70,12	15,01	9,96	11.713	75,65
	Sulawesi Selatan	69,60	12,90	7,49	9.723	68,49
	Indonesia	70,59	12,39	7,73	9.903	68,90

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Sulawesi Selatan tahun 2015

4.2. Tantangan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah memasuki era baru dengan dipergunakannya layanan pengadaan berbasis elektronik (teknologi informasi) yang dikenal dengan sebutan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dalam mewujudkan hal tersebut diterbitkanlah regulasi yang mengatur hal

tersebut yaitu : di tingkat Nasional ada Perpres No 70 Tahun 2012 dan di tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diterbitkan Peraturan Gubernur No 133 Tahun 2009 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan memanfaatkan Teknologi informasi dalam proses pengadaan Barang/jasa pemerintah, hal-hal yang dapat merusak hasil pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak sesuai harapan dapat di minimalisir, sehingga proses pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dapat dicapai.(LPSE Sulsel, 2016)

Dalam perjalanan reformasi, kasus-kasus dan masalah yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/jasa pemerintah hampir di pastikan terjadi kecurangan dan korupsi dan hal tersebut terjadi pada saat proses pengadaan berlangsung, seperti tender arisan, *mark up* proyek serta penentuan pemenang tender yang tidak berdasarkan standar-standar pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang efisien, kridebel, transparan dan bertanggung jawab.

Hal itu terbukti dari beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009, bahwa terdapat 50 perkara dari pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan total nilai proyek mencapai 1,9 trilyun. Dari 50 perkara tersebut, rata-rata 35% dari anggaran berpotensi diselewengkan, nilainya mencapai 689,19 miliar (LKPP, 2009).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk mengatasi kebocoran anggaran dalam masalah pengadaan

barang/jasa Pemerintah. Dengan manfaat *e-procurement* yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diharapkan mampu menunjang mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menyadari bahwa keuntungan dari pelaksanaan *e-procurement* meningkatkan kualitas pelayanan, karena pelayanan dapat dilakukan selama 24 jam dengan menggunakan internet, serta dapat dilakukan di mana saja. Keuntungan lainnya adanya pengurangan atau efisiensi kertas, kemudian akurasi data lebih tinggi, mengurangi kesalahan-kesalahan, dan semua proses menjadi transparan.

Dengan melihat begitu pentingnya peran strategis *e-procurement*, namun dalam penerapannya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih belum optimal, sehingga perlu ditumbuhkan faktor positif yang mendukung penerapan *e-procurement*, seperti dukungan internal organisasi, integrasi elektronik dengan penyedia, partisipasi dan perhatian penyedia, dan kemajuan peningkatan kemampuan kerja.

Dinamika sosial politik telah menggugah kesadaran masyarakat akan adanya hak untuk mengetahui pengelolaan tatalaksana pemerintahan oleh Pemerintah (*the right to know*) melalui jaminan atas informasi yang seharusnya diperoleh masyarakat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, situasi itu merupakan tantangan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat (*obligation to tell*) guna menciptakan transparansi pengelolaan Pemerintah Provinsi terutama dalam hal pemberian pelayanan public pengadaan barang/ jasa. Pemerintah provinsi di

tuntut untuk menyediakan informasi yang memadai bagi masyarakat atau bagaimana merancang sebuah sistem manajemen informasi bagi pelayan publik yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *E-government*. Sasaran yang ingin dicapai, masyarakat Sulawesi Selatan dengan mudah memperoleh dan mengakses informasi serta aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi melalui internet. Salah satu aplikasi yang kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah *electronic-procurement (E-procurement)*.

4.3. Profil NGO

a). Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi adalah sebuah lembaga non profit yang didirikan tanggal 26 Desember 1998 di Makassar yang didirikan oleh sejumlah masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dari kalangan Akademisi, NGO, Jurnalis dan Tokoh masyarakat yang konsen terhadap isu korupsi.

- Visi ACC Sulawesi

Terwujudnya masyarakat sipil yang sadar dan kritis terhadap fenomena korupsi dan terciptanya penyelenggaraan Negara untuk memenuhi kebutuhan serta hak dasar rakyat (politik, sosial, ekonomi, budaya) dengan cara transparan, akuntabel dan keterlibatan publik

- Misi ACC Sulawesi

- Mendorong terciptanya transparansi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
- Mengawasi secara langsung setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
- Mendorong penuntasan kasus-kasus korupsi
- Membangun budaya anti korupsi dengan mendorong muncul dan berkembangnya gerakan rakyat anti korupsi
- Karakteristik Gerakan ACC Sulawesi
 - ACC Sulawesi merupakan bagian dari gerakan besar masyarakat sipil
 - ACC Sulawesi memperkuat masyarakat sipil, khususnya dalam pola advokasi kasus-kasus korupsi
 - ACC Sulawesi mendorong penegak hukum progresif terhadap pemberantasan korupsi, termasuk dalam penjatuhan vonis hukuman berat kepada pelaku korupsi agar menciptakan efek jera
 - ACC Sulawesi mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara.
- Prinsip Gerakan
 - Non-Partisipan/Independen
 - Gerakan Politik
 - Berbasis Rakyat
 - Non diskriminasi
 - Kesetaraan

➤ Transparansi

b). PeRAK Institute

Lembaga Pendidikan Anti Korupsi atau biasa disebut PeRAK Institute merupakan organisasi non Pemerintahan (ORNOP), pada awal berdirinya adalah gabungan dari tiga kelompok diskusi mahasiswa. Kelompok pertama bernama Forum Studi pembangunan strategis Kontemporer (FOSBASIK), kelompok kedua, bernama Forum Studi Issu-Issu Strategis (FOSIS) UPPM UMI, dan yang ketiga bernama Institut Studi Konflik dan Perdamaian (ISKIP). Anggota dari tiga kelompok diskusi tersebut sebagian besar menjadi anggota rangkap, karena itu kemudian bergabung membentuk sebuah lembaga yang bernama PeRAK Institute pada tahun 2000 di Makassar, yang menjadi Organisasi Non Pemerintahan (ORNOP) yang memfokuskan diri pada upaya pemberantasan korupsi melalui media advokasi.

- Visi PeRAK Institute

Terwujudnya sebuah Negara dimana Pemerintah dan rakyatnya bersih, transparan, anti korupsi dan berkeadilan sosial

- Misi PeRAK Institute

- Melakukan penelitian tentang budaya korupsi di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan dan berupaya menemukan metode yang efektif untuk pemberantasan korupsi

- Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi rakyat untuk menjadi pionir dalam upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun kalangan non pemerintah
- Mengupayakan perubahan padatingkat pengambilan kebijakan dalam rangka perubahan dan perbaikan peraturan yang mempercepat pembenantasan korupsi
- Mendorong perbaikan sistem lembaga birokrasi hukum dan pengaktifan fungsi lembaga tersebut untuk mempercepat pemberantasan korupsi
- Menjadi pemantau bagi penggunaan dana-dana publik oleh pemerintahan maupun lembaga non pemerintah

c). KOPEL Indonesia

Komite Pemantau Legislatif selanjutnya disebut KOPEL Sulawesi yang pada perkembangannya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia, merupakan sebuah lembaga Non Government (NGO) didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 di Kota Makassar, dan didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun 1998 oleh sejumlah mahasiswa dan jurnalist.

- **Visi KOPEL Indonesia**

Menjadi lembaga yang berintegritas dan mandiri dalam mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan demokrasi yang lebih beradab

- **Misi KOPEL Indonesia**

- Menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip integritas pada staf organisasi melalui pengembangan diri, studi, pelatihan, pemagangan
 - Mendorong kemandirian organisasi melalui usaha pengembangan lembaga otonom yang produktif
 - Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan DPRD
 - Mewujudkan sistem pelayanan publik yang lebih bermutu melalui advokasi peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar warga.
- Lembaga Otonom KOPEL Indonesia
 - Speksi (Sekolah Parlemen KOPEL Indonesia)
 - Lembaga penerbitan
 - Lembaga usaha ekonomi : usaha rental mobil, usaha sewa vila, dan perkebuan/pertanian
 - Media www.kepol-online.or.id.

d). FIK ORNOP Sulawesi

Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Sulawesi disingkat FIK-LSM SULSEL didirikan pada 4 Juli 1990, dan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2000 berubah nama menjadi Forum informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah Sulawesi dan disingkat FIK ORNOP Sulawesi

SULSEL, merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada pemberdayaan Masyarakat.

- Misi FIK ORNOP SULSEL

Terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang kuat, demokratis, dan berkeadilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

- Misi FIK ORNOP SULSEL

- Memfasilitasi dan menguatkan kapasitas Ornop anggota untuk melakukan penguatan/ pemberdayaan masyarakat tertindas secara sosial, politik, ekonomi, hukum budaya yang tidak berkeadilan gender.

- Membangun akses dan jaringan informasi diantara Ornop Anggota dan elemen masyarakat sipil strategis lainnya yang mempunyai kesamaan visi dengan FIK ORNOP Sulsel.

- Prinsip-Prinsip Dasar Lembaga

FIK ORNOP Sulsel dalam melaksanakan fungsi managerila berpedoman pada prinsip-prinsip lembaga sebagai berikut :

- Kemitraan; membangun kerjasama dengan berbagai pihak, senantiasa berpedoman pada prinsip kesetaraan dan saling menghargai fungsi dan peran masing-masing pihak

- Transparan dan Akutambel; menjalankan fungsi-fungsinya, senantiasa menunjukkan manajemen yang terbuka kepada anggota dan masyarakat, dalam hal perencanaan dan implementasi serta pengelolaan keuangan

- Keadilan; prinsip keadilan didasarkan pada sikap objektif, proporsional dan komunikatif serta tidak membedakan latar belakang suku, agama , ras dan jenis kelamin.
- Partisipatif, senantiasa melibatkan anggota pada semua tahapan pengelolaan manajerial organisasi.

e). YASMIB Sulawesi

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi adalah Organisasi Non Pemerintah (NGO) didirikan pada tahun 1999 di Makassar. Yang bergrak dibidang pemberdayaan masyarakat dan advokasi-advokasi kebijakan pemerintah dan keuangan Pemerintah daerah.

- Visi YASMIB Sulawesi

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaulat dalam berbagai dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis dan berkeadilan.

- Misi YASMIB Sulawesi

- Mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) secara swadaya terhadap penguatan pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berspektif gender
- Mendorong terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih

- Mendorong untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik yang responsive gender dan pro-poor.
- Prinsip Dasar Lembaga
 - Integritas
 - Independen
 - Partisipatif
 - Transparansi dan Akuntabilitas
 - Kemitraan
 - Tidak berafiliasi kepada partai politik.